



WAWANCARA Olle Tornquist

Perbandingan Analisa Sejarah Menjadi Krusial untuk Membangun Gerakan Progresif Alternatif

Dampak peristiwa 1965 tidak sebatas hilangnya ratusan ribu nyawa. Akan tetapi lebih mendasar lagi, dengan hilangnya kelompok-kelompok Kiri dalam kekerasan 1965, setidaknya selama masa pemerintahan Orde Baru, Indonesia seperti mengalami ketumpulan dalam politik progresifnya. Jika demikian, mengapa politik Kiri tidak dapat kembali muncul pasca-Reformasi? *Jurnal Sejarah* membicarakan hal ini bersama Professor Olle Tornquist, profesor Ilmu Politik dan Kajian Pembangunan dari Universitas Oslo, Norwegia. Riset-risetnya berpusat pada tema-tema demokrasi dan masyarakat sipil. Beberapa buku beliau yang berpengaruh di Indonesia, antara lain: *Dilemmas of Third World Communism: The Destruction of PKI in Indonesia* (1984); *The New Local Politics of Democratisation* (2005), disunting bersama AE Priyono dan Willy Purna Samadhi; *Making Democracy Work: Problems and Options in Indonesia* (2007) disunting bersama Neil Webster dan Kristian Stokke; dan *Assessing Dynamic of Democratisation: Transformative Politics, New Institutions and the Case of Indonesia* (2013). Pada 2021, Olle Tornquist telah menerbitkan buku barunya, *In Search of New Social Democracy: Insights from the South, Implications for the North* (Bloomsbury Publishing). Kami berbincang-bincang tentang argumen Olle dalam buku tersebut, yang juga dia kemukakan secara singkat dalam artikelnya di *New Mandala* pada April 2021.

JS: Pertanyaan utama dalam artikel Anda di *New Mandala* (2021) adalah mengapa politik Kiri tidak sanggup untuk hadir kembali di Indonesia setelah penghancuran PKI. Anda berpendapat bahwa penghancuran PKI disebabkan oleh despotisme terpusat dan kekuasaan yang tidak langsung oleh militer. Pihak militer memerintahkan penggunaan kekerasan, tetapi mereka juga terlibat dalam mobilisasi massa milisi kelompok-kelompok lokal untuk menyerang kelompok Kiri. Anda juga mencatat bahwa praktik (kekuasaan tidak langsung) adalah sebuah warisan kolonial Indonesia. Pertanyaannya, bagaimana dan mengapa praktik ini masih terus berlangsung pada Indonesia pascakolonial (1960–1990-an)? Dan dalam pandangan Anda, apakah masih terus berlangsung hingga kini?

OT: Pertanyaan ini membutuhkan sebuah perspektif sejarah. Sejak 1920-an, gerakan nasionalis telah melawan praktik kolonial yang berupa despotisme terpusat dan kekuasaan tidak langsung di daerah. Gerakan nasionalis tersebut bertujuan untuk membangun hubungan langsung antara negara dan warga yang aktif, yang dihubungkan dengan organisasi demokratis mereka sendiri. Berlawanan dengan ini, adalah para pemimpin kemerdekaan yang berasal dari komunitas yang menginginkan penguasaan tidak langsung melalui agama dan kelompok etnis. Pada 1950-an, kelompok komunis-nasionalis menyesuaikan dirinya dengan peraturan main yang demokratis dan khususnya mereka berhasil membangun sebuah partai modern, bersamaan dengan serikat buruh, organisasi perempuan, dan beragam organisasi lainnya.

Organisasi-organisasi ini, dengan tuntutan sosial ekonomi yang berbeda, diajak bersama-sama menuntut kesetaraan hak sipil dan politik. Ini menghasilkan kemajuan luar biasa, seperti pemilu nasional 1955 dan pemilihan daerah 1957. Setelah itu, kelompok Kiri dan komunis-nasionalis berhadapan dengan kelompok konservatif dan beberapa kekuatan penentangan di daerah, yang didukung oleh Barat dalam konteks Perang Dingin. Sejak saat itu, kelompok Kiri dan komunis-nasionalis mendukung “Demokrasi Terpimpin” sebagai imbalan untuk perlindungan. “Demokrasi Terpimpin” diusulkan oleh Presiden Sukarno dan Jenderal Nasution yang setuju untuk keberadaan sebuah “negara-bangsa yang kuat”.

Mereka mempertahankan hubungan langsung antara negara dan warganya dengan mengganti mediasi oleh organisasi-organisasi rakyat serta pemilu multipartai dengan populisme dan pemerintahan militer. Yang paling buruk, ketika konflik meningkat pada 1965 dan pimpinan militer tidak berada dalam posisi menguasai aparatus negara yang cukup kuat serta organisasi-organisasi massanya sendiri untuk melawan kelompok Kiri (berbeda dengan pengalaman Nazi di Eropa). Mereka melepaskan prinsip hubungan langsung negara-warga dan sebaliknya menciptakan kembali kombinasi despotisme kolonial dan pemerintahan tidak langsung, yang umumnya diwujudkan melalui kaum agamawan antikomunis dan milisi. Oleh karena itu, genosida dilakukan dengan cara kolonial.

Ketika sudah selesai, pemerintah Orde Baru Soeharto kembali ke prinsip pemerintahan negara secara langsung *top-down*. Kelompok Kiri sendiri telah dikalahkan, serta para pemimpinnya yang tersebar tidak memiliki analisis yang kokoh atas kesalahan mereka sebelumnya, oleh sebab itu pemerintah dapat memaksakan politik “massa mengambang” untuk membatasi keberadaan organisasi-organisasi baru yang independen. Soeharto berusaha menjawab bertambahnya kritik yang menentang korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan

membalikkan bentuk pemerintahan negara *top-down* dengan cara politik dagang sapi dengan kelompok Muslim.

Pada masa awal reformasi, praktik ini terhenti, tetapi dalam pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono politik pemerintahan tidak langsung (*indirect rules*) dilanjutkan. Pada akhirnya, ada kemungkinan bagi kaum progresif untuk menentang hal ini dengan membangun aliansi luas di belakang pemimpin populis seperti Jokowi, berdasarkan kesetaraan warga negara untuk hak-hak sosial seperti kota yang bisa ditinggali untuk orang miskin, kesehatan publik yang merata, kondisi pekerjaan yang layak dan upah minimum. Tapi, minimnya agenda-agenda transformasi, organisasi demokratis dan kemitraan dengan pemerintah, menyebabkan gerakan ini tidak cukup kuat untuk menahan serangan ofensif kaum konservatif, yang tergambarkan dengan baik melalui kerja sama ala kolonial antara mantan Jenderal Prabowo dengan kelompok militan Muslim sejak 2014. Dan untuk mempertahankan kekuasaan, rezim Jokowi sendiri menjawab dengan mengombinasikan transaksi elitis dan kekuasaan tidak langsung dengan kaum muslim.

JS: Anda menganalisis periode 1950–1960-an, khususnya masa Demokrasi Terpimpin Sukarno, untuk mendapatkan jawaban hilangnya kelompok Kiri dalam politik di Indonesia. Anda menyinggung bahwa gerakan Kiri sepanjang periode ini tidak bersatu sebagaimana yang kita kira. Bisakah Anda menjelaskan lebih lanjut hal ini?

OT: Saat itu, tragedi berlipat terjadi. Pertama, kaum nasionalis-kiri dan komunis mendukung Demokrasi Terpimpin yang berarti mereka tidak dapat lagi membangun aliansi luas berdasarkan kesetaraan hak sipil serta demokrasi untuk memperjuangkan reformasi sosial yang luas (termasuk reformasi agraria), membatasi “*state capture*” oleh kelompok penguasa (termasuk yang disebut kapitalis birokrat) dan melawan militer yang menggunakan despotisme sentralistis dan kekuasaan tidak langsung serta represi atas nama agama serta kelompok etnik, pemimpin dan milisi-milisi.

Pada saat yang sama, yang kedua, banyak dari kaum liberal dan sosial demokrat yang berorientasi Barat mendukung apa yang kemudian hari disebut oleh ahli politik Amerika, Samuel Huntington, sebagai ‘Ketertiban Politik’ (*politics of order*). Argumen mereka adalah modernisasi serta lemahnya kelas menengah tidak mencukupi untuk membangun demokrasi. Dengan demikian, untuk itu diperlukan negara yang kuat. Dan jika tidak ada yang sanggup membangunnya, maka militer harus mengintervensi—sebagaimana yang kemudian terjadi di Indonesia, Vietnam dan Amerika Latin, termasuk penentangan pada Presiden Allende di Chile pada 1973.

Kedua strategi ini menghancurkan—sebagai halnya strategi Maois dengan perjuangan petani bersenjata. Ketiga, meski dengan kekalahan-kekalahan ini, hanya sedikit yang bersuara tentang hal ini, bahkan tidak juga dari sekian banyak pemimpin selama masa perlawanan kepada Suharto dan untuk demokrasi. Mereka berpikir perjuangan untuk sosialisme dan banyaknya LSM serta kelompok-kelompok masyarakat sipil lainnya menjadi jalan untuk terus maju ke depan. Jadi pelajaran yang penting telah terlupakan—sementara radikal-radikal baru berubah menjadi ‘demokrat mengambang’, tanpa basis dukungan rakyat.

Kaum Kiri di Indonesia tidak sendirian karena hal ini menjadi tren di dunia. Yang paling berbeda adalah kaum Kiri di negara bagian Kerala, India. Mereka bergantung pada prioritas

yang sama seperti yang diikuti kelompok progresif Indonesia sebelum Demokrasi Terpimpin—contohnya meletakkan kelompok kelas serta tuntutan-tuntutan hak sosialnya untuk bersatu di bawah payung tuntutan bersama kesetaraan hak sipil dan politik. Sampai hari ini, hal itu masih menjadi pencapaian mereka yang fundamental.

JS: Anda menyarankan agar aktivis-aktivis Indonesia harus mempelajari sejarah gerakan Kiri Indonesia jika mereka ingin politik Kiri semakin luas dalam sosial dan politik Indonesia. Mengapa menurut Anda sejarah penting bagi para aktivis? Para ahli politik kontemporer di Indonesia sangat jarang mengadopsi pendekatan sejarah dalam analisa mereka. Bagaimana pendapat Anda tentang hal ini?

OT: Fokusnya selama ini ada pada korban represi dan pembangunan yang eksploitatif. Hal tersebut penting. Tapi untuk membangun gerakan progresif alternatif, perbandingan analisa sejarah menjadi krusial untuk dipahami karena (1) apa yang membuat kemajuan perluasan kelompok kiri dengan fantastik di awal dan pertengahan tahun 1950-an; (2) mengapa dukungan pada ‘Demokrasi Terpimpin’ dan juga ‘Ketertiban Politik’ menghancurkan demokrasi; (3) sementara kaum progresif Kerala bisa maju ke depan dengan berpegangan pada pengutamaan kesetaraan hak sipil dan politik sebagai dasar dari hak sosial; (4) mengapa Maoisme bukanlah sebuah alternatif lainnya; dan (5) mengapa gerakan demokrasi yang melawan Suharto dan gerakan sesudahnya menekan memori-memori semua ini dan tidak pernah membangun aliansi gerakan rakyat yang luas. Saya berpendapat bahwa banyak hal yang perlu dipelajari dari pengalaman kemajuan sebelumnya, ketika gerakan mencoba membangun kesatuan di antara perpecahan kelompok untuk melawan kombinasi dari neoliberalisme dan politik identitas masyarakat untuk sosial demokrasi yang baru.

JS: Dalam buku Anda yang baru (2021), Anda juga mempelajari politik di Swedia. Apa yang kami, Indonesia, bisa pelajari (persoalan, perspektif dan permasalahan) dari politik Eropa utara? Apa yang menyamakan dan membedakan di antara kedua negara? Bisakah Anda menceritakan lebih lanjut buku Anda ini?

OT: Setelah krisis finansial 2008, banyak orang, termasuk saya, merasa heran dengan kenyataan bahwa partai-partai berorientasi sosial-demokrat dan gerakan tidak berhasil, bahkan banyak orang meragukan pembangunan berkelanjutan berdasarkan keadilan sosial dengan cara yang demokratis. Karenanya saya berpikir untuk harus memberikan kontribusi menjawab hal ini dengan mengunjungi lagi studi-studi saya sejak tahun 1970-an tentang gerakan rakyat dan demokratisasi di Indonesia, India, Filipina dan referensi dengan Skandinavia serta pada derajat tertentu dengan Brasil dan Afrika Selatan. Ketika saya kembali menekuni studi-studi terdahulu dan kajian-kajiannya terkini, dengan pertanyaan tentang nasib dari upaya sosial demokrasi di masa ini, terdapat pandangan baru tentang halangan dan pelajaran utama seperti juga kemungkinan-kemungkinan baru. Inilah yang saya coba tulis dengan cara yang bisa diakses, dalam buku saya yang baru *In Search of New Social Democracy: Insights from the South – Implications for the North* (Zed-Bloomsbury).

Alasan untuk tidak menulis hanya tentang kasus-kasus di Dunia Selatan tapi juga contoh paradigmatik sosial demokrasi awal di Swedia adalah bahwa krisis sosial demokrasi bersifat global. Kenyataannya, sosial demokrasi di Utara kehilangan arah ketika strategi yang terbatas secara nasional dilemahkan oleh globalisasi neoliberal. Dan alasan penting kekalahan ini pada gilirannya adalah kelemahan dari kelompok-kelompok berorientasi sosial demokratik di Selatan untuk menentang serangan kapitalis global dan membangun Orde Ekonomi Internasional Baru (New International Economic Order) bersama para sosial demokrat seperti Olof Palme dan Willy Brandt. Tambahan lagi, sosial demokrat arus utama di Dunia Utara seperti Tony Blair, dan juga pemimpin sejenis dia di Swedia, memilih untuk menyesuaikan diri dengan kendali pasar globalisasi. Implikasinya, mereka tidak menyediakan dukungan yang konsisten terhadap gerakan berorientasi sosial demokratik di Selatan, misalnya dalam gerakan mereka untuk membangun demokratisasi yang tulus. Singkatnya, Anda tidak bisa membangun sosial demokrasi di satu negara. Dan negosiasi internasional antara negara-negara maju dan pemerintah tidak mencukupi. Politik perubahan perlu dibangun berdasarkan gerakan alternatif di akar rumput. Dan mereka perlu bekerjasama dan saling belajar antara mereka. Sebagai contohnya kelompok progresif Indonesia bisa memanfaatkan pengalaman sejarah Skandinavia dalam membangun aliansi luas, politik kesejahteraan yang transformatif dan kemitraan pemerintah yang demokratis; seperti juga Skandinavia bisa banyak belajar dari sejarah Indonesia dalam mempromosikan kesetaraan warga negara dalam konteks yang multikultur dan aliansi antara buruh formal dan informal.

Rujukan

- Olle Törnquist. "The Missing of Indonesian Left. Part 1". *New Mandala*. 15 April 2021.
<https://www.newmandala.org/part-1-the-missing-new-indonesian-left/>
- _____. "The Missing of Indonesian Left. Part 2". *New Mandala*, 16 April 2021.
<https://www.newmandala.org/part-2-the-missing-new-indonesian-left/>
- _____. 'Penyebab Kemandekan dan Jalan Menuju Demokratisasi' in *Prisma* 36, No. 1, 2017: h. 3-21.
- _____. *In Search of New Social Democracy, Insights from the South, Implications for the North*. London: Bloomsbury, 2021.